



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2020/2021
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari, Tanggal : Rabu, 2 September 2020
Pukul : 14.00-16.27WIB
Sifat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat : H. M. Ihsan Yunus, M.E. Con. Std.

Acara : -Pembahasan RKA K/L TA. 2021
-Isu-isu aktual dan solusinya.

Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Hadir : 47 dari 52 orang Anggota Komisi VIII DPR RI

PIMPINAN :

1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. M. R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., Me.Con (F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA :

FRAKSI PDI PERJUANGAN

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. Umar Bashor
10. Ina Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S. Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom

FRAKSI PARTAI GOLKAR

- 17. H. John Kenedy Azis, SH.
- 18. Mohammad Saleh, SE.
- 19. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
- 20. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
- 21. Muhammad Fauzi, SE.
- 22. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
- 23. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA

- 24. Muhammad Rahul
- 25. H. Jefri Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM.
- 26. Abdul Wachid
- 27. Drs. H. Zainul Arifin
- 28. H. Iwan Kurniawan, SH.
- 29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- 30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
- 31. Dra. Delmeria
- 32. Murhadi, S.Pd.
- 33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
- 34. Muhammad Rapsel Ali

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 35. H. Maman Imanul Haq
- 36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
- 37. H. An'im Falachuddin Mahrus

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- 38. Drs. H. Achmad, M.Si.
- 39. Harmusa Oktaviani, SE.
- 40. Wastam, SE., SH.
- 41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
- 42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- 43. KH. Bukhori, LC., MA.
- 44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
- 45. Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA.
- 46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
- 47. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- 48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
- 49. H. Sungkono
- 50. M. Ali Taher, SH., M.Hum.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN

- 51. KH. Muslich Zainal Abidin
- 52. H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

Izin

:5 orang Anggota Komisi VIII DPR RI

Undangan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si.) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, B.A., B.Comm., M.E.Con):

... Sesuai dengan Tatib 251 Ayat 1 kuorum telah tercapai atas persetujuan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh Anggota Komisi VIII dan juga Pimpinan Komisi VIII maka Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka setuju? Setuju? Tertutup atau terbuka? Terbuka. Oke. Setuju.

(RAPAT: DIBUKA DAN DINYATAKAN TERBUKA)

Bu Anisa suaranya sangat jelas kalau disini Bu Anisa. Baik kami lanjutkan sesuai dengan undangan yang telah disampaikan maka rapat pada hari ini di bicarakan di acara kan sebagai berikut:

1. Yang pertama pengantar ketua rapat.
2. Yang kedua penjelasan dari Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengenai pembahasan RKA K/L 2021 dan isu-isu aktual.
3. Yang ketiga tanya jawab.
4. Yang keempat kesimpulan;
5. dan yang paling akhir penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setujui? Yang virtual setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Di virtual satu Ibu Anisa Syakur kalau 1 orang cukup semua Pak. Selanjutnya rapat hari ini akan kita akhiri pada pukul jam 16. 00. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang hormati,

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3 Pasal 98 Ayat 2 Huruf B yang mengatur salah satu tugas komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Komisi VIII DPR RI mendorong dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada rencana kerja pemerintah tahun 2021 dengan memprioritaskan pada penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang terdampak Covid-19.

Berdasarkan prioritas kegiatan tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp.279.568.938.000 harus memperhatikan setidaknya lima prioritas pembangunan bidang perempuan dan anak yaitu:

1. Yang pertama meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Yang kedua, meningkatkan peran ibu keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan anak.
3. Yang ketiga menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Yang keempat menurunkan pekerja anak;
5. dan yang kelima mencegah perkawinan anak.

Adapun perkenaan permintaan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp.156.596.000.000 dalam rangka pelaksanaan penambahan fungsi baru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni pertama penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan yang kedua terkait penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Komisi VIII DPR RI mendukung pelaksanaan fungsi baru tersebut dan akan kita bahas hari ini dalam rangka perlindungan perempuan dan anak seluruh Indonesia.

Memperhatikan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 oleh BPK pada tanggal 18 Mei 2020 yang memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadikan Rapat Kerja pada hari ini sangat penting untuk membahas, enindaklanjuti, serta merekomendasikan hasil pembahasan RKA K/L tahun 2021 dan juga isu-isu aktual yang akan disampaikan pada hari ini.

Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kami hormati.

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua sesuai dengan acara yang telah kita sepakati kami persilahkan kepada saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan penjelasannya terima kasih.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* salam sejahtera untuk kita semua. *Salom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya*, salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Komisi VIII DPR RI yang kami hormati.

Para Anggota Komisi VIII DPR RI baik yang ikut secara offline maupun virtual pada sore hari ini yang saya hormati.

Demikian juga hadirin yang saya hormati hadirin dan rekan-rekan media pada sore hari ini.

Tentu sebagai umat beragama pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat *walafiat*. Walaupun saat ini kita masih terus berjuang melawan Covid-19 semoga Tuhan Yang Mahakuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada kita untuk bisa mengakhiri ini semua dengan selamat.

Pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan tentang yang pertama rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2021. Demikian juga tentang isu-isu aktual dan solusinya.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati.

Berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran tahun 2021 kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020. Organisasi tata kerja tersebut disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam organisasi dan tata kerja tersebut Kementerian PPPA mempunyai 9 fungsi, dimana 2 diantaranya seperti apa yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang pengantarnya tadi itu dua fungsi baru yang operasional yaitu yang pertama penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Yang kedua penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memerlukan koordinasi tingkat nasional, dan internasional.

Selanjutnya berdasarkan Permen Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 4 Tahun 2020 tersebut struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melalui mengalami penyesuaian nomenklatur. Yang semula terdapat 10 Eselon 1 dan sesuai dengan Permen baru ini kami Eselon 1-nya ada 9 dengan ... terjadi di salah satu staf ahli menteri. Lala dulu staf ahli menteri ada 4 di OTK baru ini staf ahli ada 3. Sehingga strukturnya menjadi pertama itu ada sekretariat kementerian di mana sekretariat kementerian kalau dulu itu hanya ada tiga biro dan sekarang dengan OTK baru ini ada empat biro di mana satu

tambahan bironya itu adalah Biro Data dan Informasi karena kami hemat kami di kementerian ini biro ini sangat penting untuk kita apa untuk kita sehingga kegiatan-kegiatan nanti betul-betul mengacu pada data dan nanti program yang kita lakukan itu tepat sasaran. Makanya dari 3 biro kita tambah satu biro itu adalah Biro Data dan Informasi.

Kemudian ada Deputi Kesetaraan Gender. Dari sekretariat kalau kedeputian ini masih tetap lima ada 5 di putih yaitu Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Kemudian staf ahli itu ada tiga seperti di awal kami sudah sampaikan.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor S_692 tanggal 5 Agustus 2020 tentang pagu anggaran kementerian/lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 telah ditetapkan Pagu anggaran tahun 2021 Kemen PPPA adalah sebesar 279,5 miliar rupiah. Jumlah ini sesuai dengan pagu indikatif tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 5,9 miliar atau sebesar 2,17% dibandingkan dengan tahun 2020 sebelum *refocusing* yang sebesar 273,6 miliar rupiah. Dan rincian Pagu anggaran tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut program adalah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 1. Rincian anggaran menurut program tahun 2021 itu program dukungan manajemen operasional adalah sebesar Rp.89.403.847.000. Demikian juga non operasional yang terdiri dari program dukungan manajemen dan program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp.190.165.091.000 dimana untuk anggaran tahun, pagu anggaran tahun 2021 ini sudah termasuk belanja operasional pegawai sebesar Rp.51.345.541.000. Demikian juga belanja operasional barang itu sebesar Rp.38.058.306.000.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Para Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 27 Agustus Tahun 2020 telah disepakati rincian anggaran per program sebagaimana tertuang dalam tabel 2. Di mana terdapat pergeseran anggaran antar program dari program dukungan manajemen ke program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak dengan nilai sebesar 4,5 miliar. Berkaitan hal tersebut pada kesempatan ini mohon berkenan Komisi VIII DPR RI untuk menyetujui pergeseran anggaran antar program tersebut.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang berbahagia.

Pagu anggaran sebesar 279,5 miliar rupiah tersebut tentunya belum mencukupi kebutuhan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak khususnya apabila dikaitkan dengan penambahan fungsi baru. Untuk itu pada saat pelaksanaan pertemuan tiga pihak dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas kami telah mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar 156,5 miliar. Seperti apa yang pernah sudah kami presentasikan ketika kita RDP pada tanggal 23 Juni 2016 bulan yang lalu.

Namun demikian Bapak Ibu yang kami hormati usulan tambahan yang kami ajukan pada saat pagu indikatif belum mendapat persetujuan hingga pagu anggaran ditetapkan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI agar usulan tambahan anggaran tahun 2021 bisa terwujud dan disetujui pada saat penetapan pagu alokasi di bulan Oktober. Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan seperti apa yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang di awal pemaparan tadi adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi baru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu yang pertama berkaitan dengan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang demikian juga koordinasi nasional dan internasional.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan surat bersama tersebut selanjutnya kami menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2021 dirinci ke dalam rencana kerja dan anggaran K/L satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun rincian Pagu anggaran tahun 2021 menurut satuan kerja sebagaimana tercantum pada tabel 2, dan rincian anggaran menurut jenis belanja pada RKA K/L tahun 2021 tercantum pada tabel 3.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Sejalan dengan kebijakan belanja Pemerintah yang didorong penggunaannya untuk menjadi momentum transisi menuju normal secara bertahap menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca pandemi Covid-19 serta penguatan reformasi untuk keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah atau *middle income trap*. Maka dalam pengalokasian pagu anggaran tahun 2021 kebijakan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada:

- Efisiensi belanja;
- Penguatan daya saing sumber daya manusia;
- Optimalisasi teknologi informasi;

- Peningkatan kemampuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rujukan akhir tingkat nasional, serta lintas provinsi dan negara;
- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; dan pengarusutamaan hak anak di kementerian lembaga dan pemerintah daerah;
- Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial sebagai upaya mempercepat pemulihan pandemi Covid-19;
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi antara kementerian lembaga pemerintah daerah dan lembaga masyarakat termasuk media dunia usaha perguruan tinggi tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Kemudian juga pelaksanaan survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja dan;
- Peningkatan program reformasi birokrasi melalui pelaksanaan birokrasi yang lebih efisien melayani dan bebas korupsi dan;
- Tentunya adalah pelaksanaan prioritas pembangunan perempuan dan anak sesuai dengan 5 arahan bapak presiden yaitu:
 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan
 2. Meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan.
 3. Demikian juga menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 4. Menurunkan pekerja anak dan;
 5. Mencegah perkawinan anak.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Hal lain terkait program atau kegiatan dan anggaran yang perlu kami laporkan adalah bahwa pada tahun anggaran 2021 Pemerintah akan mengalokasikan dana alokasi khusus atau DAK nonfisik perlindungan perempuan dan anak sebesar 101,7 miliar di 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota. Hal ini merupakan sebagai tindak lanjut hasil Ratas tanggal 9 Januari 2020 tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak. DAK nonfisik perlindungan perempuan anak diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak. Bentuk kegiatan DAK non fisik adalah pertama pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan atau TPPO tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, pencegahan kekerasan dan

atau terhadap perempuan dan anak, dan yang ketiga itu adalah penguatan UPTD PPA.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini juga kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI kiranya dapat menyetujui rencana kerja anggaran kementerian tahun 2021 itu dan memperjuangkan usulan DAK non fisik PPA pada anggaran tahun 2021 demi kesejahteraan perempuan dan anak-anak Indonesia.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini juga kami akan sampaikan berkaitan dengan isu aktual dan solusinya. Nah menjadi keprihatinan kita semua bahwa data dari berbagai sumber menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi saat ini. Hal ini ditunjukkan dari berbagai survei dan data yang pertama kalau kita melihat kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak berdasarkan data survei pengalaman hidup perempuan nasional yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 ditemukan bahwa satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya, dan 1 dari 10 perempuan pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Selanjutnya berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan. Sedangkan berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau simfoni-PPA terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa sebanyak 3.757 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 5.035 kasus hingga 8 Agustus 2020 ini. Sementara itu berdasarkan data layanan sejiwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 1 Juli tahun 2020 diperoleh data sebanyak 9.809 aduan terkait dengan perempuan dan anak.

Kemudian isu aktual lainnya itu adalah dorongan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2021 Berdasarkan hasil Rapat Baleg DPR RI dan Pemerintah pada tanggal 2 Juli 2020 salah satu keputusan menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak menjadi program prioritas Prolegnas 2020. Keputusan ini telah mengundang reaksi cukup meluas. Oleh sebab itu menanggapi dan mendengarkan aspirasi masyarakat kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah hadir dalam diskusi dengan akademisi dan berhasil mengumpulkan dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyelenggarakan serangkaian diskusi daring dengan pakar hukum, anggota Komisi VIII DPR RI dan lembaga masyarakat termasuk lembaga pengadilan

layanan dan kelompok mahasiswa mengenai strategi dan upaya penghapusan kekerasan seksual pada tanggal 22 Juli 6 Agustus dan 12 Agustus 2020. Beberapa hal penting yang dibahas adalah aspek pemidanaan, bagaimana peran adat dalam penghapusan kekerasan seksual, peran akademisi dalam penghapusan kekerasan seksual, demikian juga bagaimana peran keluarga dalam penghapusan kekerasan seksual.

Sejak awal Agustus telah dilaksanakan upaya upaya untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian lembaga yang pada tahun 2019 dan ditunjuk sebagai tim penyusun penyusunan tim pemerintah untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan Surat Presiden. Pertemuan diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga hal penting yang dibahas adalah sinergi dan keterkaitan RKUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami mengharapkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dapat memberikan dukungan dengan melakukan pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Yang ketiga itu yang ketiga adalah ... dan sosial yang terus terjadi dengan perempuan dan anak menjadi salah satu kelompok rentan yang memerlukan respon cepat lintas sektor. Saat ini DPR RI juga sedang melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mengingat korban dan dampak terbesar dari bencana adalah perempuan dan anak kami mendorong dalam proses pembahasan revisi undang-undang ini berperspektif gender dan anak untuk menjadi salah satu prinsip yang harus dipertimbangkan mulai dari fase pra bencana, masa tanggap darurat. dan pasca bencana. Dan yang keempat adalah isu perdagangan orang juga menjadi salah satu fokus perhatian kami saat ini melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan TPPO kami terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dan daerah untuk mencegah berkembangnya perdagangan orang dengan modus baru yang juga semakin bervariasi.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan isu-isu yang terjadi, upaya yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bentuk dukungan terhadap penegakan hukum adalah yang pertama penataan dan penguatan kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta penyiapan layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat nasional untuk merespon tambahan fungsi. Demikian juga penguatan koordinasi sinergitas dan jejaring dengan pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga apakah itu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian KUKM, Kementerian PUPR dan kementerian lembaga lainnya. Demikian juga Lembaga Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak yang selama ini kami

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bergandengan tangan bersinergi dengan PT PNM dengan program Mekar demikian juga PEKA dan lain-lain.

Yang kedua adalah peningkatan upaya perlindungan anak korban kekerasan termasuk korban TPPO. Kemudian yang langkah yang kami lakukan yaitu penguatan upaya pencegahan yang pertama penyusunan peraturan perundang-undangan, dan tancangan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan panitia antar kementerian dan non kementerian. Yang kedua itu adalah koordinasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye yang terkait dengan lima isu prioritas. Yang ketiga penguatan peran masyarakat, media, dunia usaha dan perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak seperti pada PADBM P2 TP2A, Puspa, demikian juga dengan forum jurnalis.

Yang keempat peningkatan peran keluarga melalui partisipasi masyarakat termasuk tim penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain melalui forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor; mendorong replikasi pendidikan orang tua berbasis komunitas yang dikembangkan oleh masyarakat yang selama ini kami sudah intens juga bekerjasama dengan pemerhati anak baik dengan sekolah-sekolah perempuan di tingkat akar rumput. Demikian juga mudah-mudahan ke depan dengan inovasi baru kita bisa buat sekolah ayah dan sekolah orang tua. Kemudian muatan upaya pelayanan bagi korban:

1. Yang pertama mendorong pembentukan unit pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang saat ini baru terbentuk di 28 provinsi dan 64 kabupaten kota. Nah pada kesempatan ini juga dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu yang terhormat bahwa berkaitan dengan UPTD ini adalah suatu wadah memang sangat penting untuk kita butuhkan. Tapi kami sudah apa menjalin kolaborasi yang intens kami sudah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri karena intervensi kepada daerah ini kekuatan ada di Kementerian Dalam Negeri itu melalui surat edaran, kemudian juga himbauan sudah dilakukan oleh Kemendagri untuk pembentukan UPTD TPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota.
2. Yang kedua pengembangan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dengan data dan informasi di unit PPA dan lembaga penyedia layanan lainnya.

3. Yang ketiga membangun layanan Satu Atap termasuk telepon sahabat perempuan dan anak itu 129 dan layanan psikologi untuk sehat jiwa melalui layanan *Call Center 119 extension 8* dan;
4. yang keempat peningkatan kesepakatan bersama tentang peningkatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan TPPO guna meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kementerian lembaga terkait kebijakan program atau kegiatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kelembagaan yang mendukung pelaksanaan SPPA dan DPPA.

Kemudian peningkatan upaya pemberdayaan melalui peningkatan pemberdayaan ini yang kita lakukan yaitu adalah penguatan koordinasi dengan PTPNM melalui program mekarnya bagi perempuan keluarga pra sejahtera. Kemudian peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan bagi perempuan penyintas, perempuan kepala keluarga, demikian juga perempuan korban bencana. Dan yang ketiga peningkatan kepemimpinan perempuan di desa yang bekerjasama dengan CSO dan Kementerian Desa.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Bersama ini pula kami sampaikan bahwa melalui Rapat Kerja Komisi VIII ini mohon kerjasama dan dukungan Bapak Ibu sekalian agar kami dapat mengemban amanah ini dengan baik demi kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia untuk mewujudkan perempuan berdaya dan anak-anak yang berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti Shanti Shanti Om.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam. Terima kasih.

Ibu/Bapak yang kami hormati.

Demikianlah penjelasan dari Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu kepada para Anggota untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya yang hadir fisik dulu. Boleh duluan tapi enggak boleh pulang abis itu. Silakan siapa yang mau Pak Bukhori, Pak Jefry. Semua. Ya. Singkat padat Pak Bukhori 3 menit.

F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):

Oke, terima kasih Pak Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran, deputi dan seluruh staf yang saya hormati.

Pada dasarnya kami tidak keberatan untuk pengajuan anggaran tambahan ya. Tetapi ini memang perlu ada penjelasan terlebih dahulu, apalagi Bu Menteri tadi menyampaikan paparannya ternyata naskahnya beda naskahnya beda. Jadi memang naskah yang kami terima ini adalah naskah naratif begitu sementara Ibu punya itu campuran antara narasi dengan itu berapa ini. Karena itu misalnya tadi ketika ada apa struktur *structure*. Enggak boleh bicara ini. Ya boleh. Ini sudah tidak berfungsi ini. Kondisi sedang miring-miring Pak. Kondisi sedang miring-miring. Jadi nanti tolong dilengkapi ke kita walaupun secara substansi memang tidak berbeda hanya ada beberapa tekanan-tekanan yang disampaikan memang kita tidak bisa mengikuti. Itu yang pertama.

Yang kedua Bu Menteri ini kan ada beberapa kalau di anggaran untuk rencana anggaran atau pagu untuk 2021 kan 279,5 ada penambahan kurang lebih 5,9 miliar. Jika dilihat dari anggaran tahun 2020, ya walaupun sedikit kita syukuri meskipun kami Bu pengennya banyak, berkali-kali lipat begitu. Tetapi saya ingin memberikan beberapa catatan Bu. Catatan yang pertama, tadi saya lihat itu pengajuan untuk 156,5 ya? Itu pengajuan penambahan baru ini kaitanya ada beberapa fungsi baru ya? Atau semacam deputi baru itu penyediaan layanan nasional ... itu. Saya kira sih pada dasarnya sih kami tidak keberatan tetapi ini perlu pendalaman ya dan bahan ini kita terima juga sebelum rapat ini.

Dan yang ketiga yang terakhir saya -karena dipesan Pak Ihsan cepat-cepat Pak dan Ibu- jadi ini kan juga saya menanyakan gimana model kontrol nanti rencanakan akan ada DAK yang lebih 101,7 miliar untuk 34 provinsi, apakah ini nanti berada di dalam kendali Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atautah ini sebenarnya nanti masuk ke pemerintah daerah dan langsung ke desa? Itu tolong dijelaskan dan bagaimana model kontrolnya seperti apa itu.

Yang paling terakhir tadi memang isu-isu yang sangat penting ya saya melihat Kementerian Perempuan isunya tidak ada selain daripada kekerasan perempuan itu ya? Saya melihatnya kok jadi perlu ada semacam apa iya begitu lho? Karena kalau dilihat data yang disampaikan di sini itu cuman hanya ada kurang lebih sekitar 5.000 kasus, 5000 kasus pencampuran. Dan kalau kita lihat misalnya kriminal yang ada di kita dicatat di dalam ... lebih daripada 50.000 kasus itu tidak ada kementerian tersendiri itu. Kalau ini 5000 kasus dari 270 juta atau kemudian dari separuh misalnya terkait dengan perempuan itu kan pasti perempuan dengan laki-laki dan model belum jelas. Karena itu menurut saya, saya merasakan di lapangan ya sebenarnya persoalan perempuan ini bukan persoalan kekerasannya. Yang kami rasakan di masyarakat itu adalah masalah perempuan adalah yaitu bagaimana kemudian kita tingkatkan perempuan itu dari sisi edukasi, pendidikan mereka ketika mereka pendidikannya itu adalah diatas SMA pasti dia akan bisa menjadi perempuan yang mandiri, dan perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas sebagai warga negara. Dengan demikian misalnya dalam

konteks perkawinan yang di bawah umur lalu, kemudian juga dengan kekerasan, dan seterusnya itu pasti akan terhindarkan. Jadi kalau pendekatan selalu pendekatan-pendekatan hukum khawatirnya nanti akan menimbulkan konflik.

Pertanyaan berikutnya adalah kalau kemudian perempuan itu diberdayakan di sini makanya adalah dipaksakan kepada posisi-posisi politik misalnya bukan berarti laki-laki tidak mau ... kepada perempuan sangat senang tapi kalau dipaksakan ini, ini belakang ini kita ada yang namanya keluarga. Kita ingat betul di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 B ya itu mengatakan "Setiap orang berhak memiliki keturunan yang sah, memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah" Artinya adalah Undang-Undang Dasar itu memahami betul bahwa keutuhan negara ini basisnya adalah keluarga. Jangan sampai nanti ketika perempuan ini justru dihadapkan dengan keluarga itu sendiri atau kemudian terpicu atau program-program kita justru akan menimbulkan tidak terjadinya harmoni dalam keluarga. Yang mestinya adalah harmoni keluarga. Harmoni keluarga dalam urusan domestik itu tentunya tidak dalam penjelasan di dalam konteks penyelesaian hukum tetapi kemudian penyelesaian edukasi. Dengan demikian bahwa kekerasan kekerasan dalam petik tadi yang ada di dalam rumah tangga atau mengalami kekerasan antara laki perempuan itu kemudian terhindarkan dengan konteks yang karena adanya satu edukasi. Jadi saya lebih *prefer* kalau kemudian memang pola-pola kita adalah bagaimana meningkatkan perempuan itu dari sisi edukasi dan pendidikannya. Pak Pimpinan, saya kira itu dan saya mohon maaf karena kebetulan saya harus ada tugas yang lain. Mohon maaf Bu Menteri nanti kalau seandainya saya tidak bisa mampir sampai akhir tapi PKS ada 3 anggota itu. Terima kasih banyak *assalamu'alaikum*.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam. Terima kasih Pak Bukhori silakan selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bu Diah. Ya silakan Bu Diah.

F- PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si):

Terima kasih Pak Ihsan. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Salam sejahtera untuk kita semua.

Melanjutkan tadi dari Pak Bukhari 5.000 berani melapor Pak. Yang nggak berani melapor kita nggak tahu. Tapi kekerasan itu *problem* dan kalau dilihat program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak luas juga ya Bu Bintang ya? Dari mulai pendidikan dari mulai pengasuhan, kekerasan keluarga juga. Nah kalau dilihat secara umum atau anggaran ini seperti bikin Renstra. Jadi pendekatannya paradigmatis ya bagaimana memasukkan poin-poin ini kedalam kerja-kerja kementerian lain sebetulnya.

Nah saya tertarik kalau ada perubahan-perubahan metode apakah programnya itu sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya atau

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya metode-metode dalam melakukan apa *gender mainstreaming* atau koordinasi antar kementerian dan lembaga? Apakah ada satu hal yang menjadi inovasi-inovasi? Saya tidak bicarakan angka anggarannya kalau angka anggarannya menjadi signifikan kalau kita bisa mendapatkan gambaran pendekatannya. Apakah jadi mungkin lebih pertanyaan saya lebih kualitatif ya. Sebetulnya apa sih yang baru pendekatan-pendekatan apa mungkin di antara deputi-deputi yang membangun apa ya tidak cara pandangnya sama tapi pendekatannya dianggap misalnya yang lalu tidak efektif dalam perlindungan anak sekarang ada metode baru metode barunya bagaimana gitu? Nah itu kita pengen tahu. Lalu sejauh apa program-program kesadaran gender ini ditangkap oleh kementerian-kementerian dan lembaga lain? Apakah di respon baik sehingga bisa melalui kementerian lain ada perubahan perubahan paradigmatik terhadap program di kementerian lain atau lembaga ataukah masih mengalami kesulitan dalam menjelaskan pentingnya pengarusutamaan gender dan juga perlindungan anak di kementerian lainnya? Juga mungkin pemerintah daerah sehingga anggaran anggaran yang sifatnya kayak DAK misalnya. Itu tiap daerah kan pasti variasinya beda-beda. Apakah karakter anggarannya DAK ini semua wilayah sama atau ada pendekatan-pendekatan yang berbeda juga dan daerah-daerah mana yang kiranya yang menjadi contoh yang bagus lah untuk program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sehingga kemudian menjadi inspirasi untuk lahirnya kebutuhan dkk untuk menjadi *support* bagi pemerintah daerah yang dianggap bagus dalam pendekatan program-program terhadap pendekatan terhadap solusi persoalan perempuan dan anak? Pertanyaan saya mungkin lebih kualitatif.

Yang kedua nih kalau saya perhatikan KPAI kayaknya anggarannya turun ya? Dari 17 jadi 13. Nah sementara kalau kita dengarkan ada peningkatan gaji komisioner. Nah dengan turun ini apakah pengurangan programnya bagaimana itu nih di KPAI. Kita ingin tahu juga gitu karena kalau dari 17 ke 13 signifikan juga 4 atau 4 M tuh berarti hampir 20% lebih kalau dari 17, 20% lebih. Nah itu minta juga Bu Bintang takutnya ada yang kelupaan begitu kenapa sih kok tidak diprioritaskan dalam tahun ini gitu. Seingat saya kemarin 17 lebih itu belum dengan peningkatan gaji. Nah sekarang berarti 13 lebih dengan peningkatan sudah dengan penambahan gaji komisioner. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Ya itu aja mungkin saya lebih ingin *explore* program-program dari kedeputian mana yang dianggap kita ingin melihat progres tentunya ya pendekatan baru, yang lebih efektif, *review* atas pendekatan-pendekatan lama karena ini kan memasuki tahun anggaran baru itu. Semoga 1 tahun kemarin udah cukup apa ya melahirkan *output review* gitu untuk bisa memformat program yang lebih dianggap lebih progres-lah lebih maju, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Diah. Sabar ya Bu, virtual nanti belakang ya. Silakan Pak Jefry. Ya Bu belakang.

F- PARTAI GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Terima kasih Pimpinan. *Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga Bu Menteri beserta jajarannya.

Dari paparan yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama ini pada slide terkait dengan kebijakan RKA K/L tahun 2021. Di situ pada poin 4 dan 7 ada yang menyebutkan mengenai peningkatan dan penguatan. Nah peningkatan dan penguatan itu *real action action plan*-nya itu seperti apa kira-kira. Kemudian pada *slide* upaya Kementerian PPPA dalam perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PPPA, serta penyiapan layanan perlindungan perempuan dan anak. Saya melihat kenyataan layanan perlindungan tingkat nasional ini apakah bentuknya seperti *call center* atau memang ada tim khusus untuk mengenai hal tersebut. Dan kemudian pada isu-isu aktual yang tadi sudah disampaikan. Saya melihat ke situ Kementerian PPPA tidak menyinggung mengenai masalah pandemi Covid-19 ini di mana menurut saya itu memang hal yang sangat penting dan juga dampaknya luar biasa, bisa saja ke perempuan dan anak.

Kemudian juga mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Diah mengenai penurunan tersebut anggaran ya? Apakah ini memang karena tahun ini saya sempat mendengar laporan penyerapannya agak kurang atau bagaimana? Seperti itu barangkali demikian yang saya sampaikan terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak Muhammad Husni, dari Partai Gerindra.

F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Bapak pimpinan Komisi VIII (Pak Ihsan, Pak Ace, dan Pak Marwan).

Yang saya hormati teman-teman saya dari Komisi VIII baik yang hadir fisik maupun yang hadir cara virtual.

Tentunya rasa hormat saya kepada Ibu Menteri dan seluruh jajarannya yang telah berhadir di tempat ini.

Di sini ini masalah apa ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa tiang sebuah keluarga itu ada pada perempuan, ada pada istri kita dan ada pada ibu kita. Begitu juga tiang sebuah negara itu ada pada perempuan. Hancurnya sebuah keluarga hancurnya sebuah bangsa juga ada pada perempuan. Sekarang *trend* di negara-negara maju negara-negara yang katanya sudah begitu hebat hampir tidak ada perkawinan. Mereka rata-rata tidak mengasuh tidak mau punya anak dan lain sebagainya. Jadi Pak Ketua Ada apa itu di tempat kita tuh yang dikatakan itu banyak anak banyak rezeki tapi kan perlu juga tuh pertahankan. Kemudian *mangan ora mangan* yang penting kumpul. Tapi kalau dulu itu sesuatu yang mungkin agak-agak aneh ya. Tapi penduduk dunia itu makin lama saya rasa di negara-negara maju tuh sudah makin berkurang. Saya jalan ke Jepang jalan-jalan ke Eropa itu sekolah SD itu banyak yang tutup nggak ada murid Bu ya. Itu fenomena yang terjadi di dunia sekarang ini. Jadi apa yang permohonan daripada Ibu Menteri untuk pagu anggaran 156,5 miliar ya dan juga pergeseran anggaran yang 4,5 miliar ya kami menyetujuinya. Kemudian lagi dalam hal dana alokasi khusus DAK non fisik perlindungan perempuan dan anak sebesar 101,7 miliar dan juga kita memberi dukungan untuk antrian KPPPA ini.

Tadi Ibu menyinggung tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah semakin meluas dimana mana mungkin di sini banyak yang aturan-aturan yang akan kita masukin. Tapi Pak Ketua saya yakin ini Pak Ketua kitanya orang Komisi VIII orang baik-baik semua nih. Mudah-mudahan ahli surga kembali ini. Kami ini mudah-mudahan lagu yang kepala keluarga, pimpinan, rumah tangga orang yang paling sayang sama suami sama istri dan anaknya. Kemudian lagi, ya kemudian ya kami sekali lagi memberi dukungan kepada Kementerian PPPA silakan bekerja dengan semaksimal mungkin nanti kalau ke Medan jangan lupa lupa ajak kami ya Bu. Itu dapil kami. Begitukan Pak Marwan Dasopang kan? Saya kira itu saja dari saya. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Sungkono dari Fraksi PAN.

F- PAN (H. SUNGKONO):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Yang kami hormati Ibu Menteri dan jajarannya.

Bicara kementerian ini saya pikir sesungguhnya strategis. Cuma anggarannya memang relatif kecil cuma karena tujuan Pemerintah juga untuk

meningkatkan kesejahteraan terutama perempuan. Anggaran yang menurut saya kecil ini berkaitan dengan program. Apa memang program itu kurang mengena sama apa memang Pemerintah kurang respon dengan anggaran/ Kalau anggarannya besar tapi kalau nggak mampu menjalankan coba sia-sia gitu ya. Jadi saya mohon program Ibu benar-benar program ini sejak awal bagaimana membina peningkatan kualitas perempuan Indonesia dan anak kita. Jangan-jangan seperti apa pemadam kebakaran kalau ada masalah baru kita turun itu.

Tadi disampaikan beberapa orang mungkin untuk bagian itu memang berangkat dari perempuan terutama keluarga kecil kita sampai masyarakat sampai tingkat nasional kita. Kalau ibu-ibu di rumah tangga kita produktif pikirannya pasti positif Ibu. Kalau enggak produktif rumpi/ngobrol yang dibahas hari ini malah kurang mungkin kurang bagus jadinya fitnah. Kalau kita terjadi pada masalah muncul keluarga apalagi dengan suasana kondisi ekonomi secara nasional karena Covid ini sudah menurun secara global juga kita pasti mengalami kesulitan ekonomi. Turunnya berikutnya pasti rumah tangga itu akan banyak masalah di mana orang yang bekerja dengan baik pikiran yang positif maupun membiayai keluarganya sekarang tidak lagi. Jangan-jangan nanti istrinya kewajibannya enggak terpenuhi marah-marah karena dia siap itu anaknya mau sekolah, mau jajan nggak mampu akhirnya bapaknya marah. Memang dipicu untuk itu kalau kondisi miskin itu.

Jadi tugas negara adalah mensejahterakan rakyat apapun yang Ibu lakukan untuk membangun perempuan supaya tidak mendapatkan dampak kekerasan di rumah tangga tidak akan bisa sukses kalau posisi keluarganya tidak sejahtera terutama. Kalau bicara kasus adalah seorang suami atau bagi perempuan juga ada yang menyiksa suami sebelumnya ada terjadi begitu. Jadi saya pikir program Ibu ini membangun karakter itu penting. Bagaimana program yang bisa menyentuh pada seluruh aspek kehidupan dari bawah itu bisa dilaksanakan itu. Kalau hari ini negara kita mampu membangun itu terutama yang berkarakter akhlak ya kalau ngomong agama kan semua agama juga melakukan hal yang sama gitu dengan tuntutan dan ancaman global baik perang yang berkaitan dengan ideologi atau bagaimana bahasa ini supaya hancur memang terjadi gitu. Kalau kita gak melawan dari bawah dari program Ibu saya rasa nanti Ibu makin lama bukan makin ... gampang pasti makin sulit begitu.

Jadi saya mohon Pemerintah dalam hal ini juga supaya berpihak dengan membentuk atau memberikan anggaran yang cukup begitu. Ya untuk itu harus meyakinkan Ibu di rapat kabinet itu supaya visi Ibu membangun Indonesia dengan sejahtera dari keluarga itu betul-betul terwujud bisa terwujud kalau Pemerintah tidak respon ya makin susah. Jadi saya mohon beberapa program itu benar-benar bisa menyentuh aspek ekonomi atau kecerdasan untuk apa bangsa dari bawah dari orang-orang perempuan terutama yang melahirkan anak itu dapat apa ya semacam impian kalau di mana seorang menteri memberikan program ini membuat mereka senang itu.

Kalau programnya cuman kalau ada masalah Ibu turun di bangun media digembar-gemborkan kesan pemerintah itu peduli tapi kenyataannya hanya kasuistik. Jadi lebih baik tidak muncul di publik tapi kerja Ibu benar-benar bisa membooming Ibu.

Jadi saran saya itu Ibu mengenai tadi ada yang DAK 101 miliar, apakah program itu tidak disosialisasikan tingkat kabupaten, kota, provinsi. Kan harusnya ini program nasional? Andaikan program itu sudah di cover oleh anggaran APBD provinsi saya rasa 1,1 miliar tu juga bisa bisa juga Bu. Contoh saja anggaran kabupaten kota Sidoarjo, APBD itu hampir 5 triliun. Kalau angka untuk memang sejak awal kelembagaan ini memang direspon dari bawah ... kabupaten kota program ini hanya nampak. ... kan tapi secara fisik program ini nggak begitu nyata cuman kalau ada masalah baru lah seperti ada kebakaran itu. Saya rasa sosialisasi dan semangat itu harus didukung dari tingkat bawah bagaimana ini bisa paling tidak harus didukung memberikan sosialisasi yang sungguh-sungguh bahwa supaya masyarakat itu melalui wakil-wakilnya di daerah kabupaten, kota dan provinsi berpihak pada program ini begitu. Terima kasih *assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, selanjutnya kami persilakan dari virtual. Ya silakan Bu Anisah Sakur.

F- PARTAI NASDEM (Dra. Hj. ANISAH SAKUR, M.Ag):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ... merupakan ... dikatakan jelek ... kepentingan kepada masyarakat secara luas.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selanjutnya silakan yang dari virtual cukup? Teman-teman anggota kami persilakan Pak Ace. Siakan Pak Ace.

F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Ibu yang kami hormati.

Pertama ya kita tentu saya tidak meragukan kapasitas Ibu Menteri dan seluruh timnya untuk bisa bekerja dalam tugas-tugas yang telah diberikan sesuai dengan tupoksinya. Yang menjadi konsen saya sebetulnya adalah soal anggaran saja Bu, yang masih sangat kecil gitu ya. Oleh karena itu saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu dan nanti saya minta sama teman-teman yang ada di Banggar dari Fraksi Partai Golkar untuk jika ada dana optimalisasi bisa diarahkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena Pagu anggarannya memang sudah diketok oleh Kementerian Keuangan dengan jumlah yang sangat terbatas seperti ini Bu.

Jadi oleh karena itu untuk anggaran yang dimintakan oleh Ibu oleh kementerian tentu kami meminta nanti jika ada misalnya pada proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran kami ingin apa namanya yang prioritas yang dari Komisi VIII itu tentu kita berikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Yang kedua juga karena satuan kerja KPAI ini juga ada di kementerian Ibu ya maka kami pun juga menginginkan agar apa yang diusulkan oleh KPAI juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usulan anggaran yang ada di Kementerian PPPA itu ya. Jadi oleh karena itu tentu kami menginginkan kemudian nanti kami akan saya mohon nanti Pimpinan dimasukkan di dalam kesimpulan rapat soal persetujuan usulan anggaran itu Pak Ketua ya supaya nanti dimasukkan di dalam kesimpulan rapat kita. Saya kira itu ya Bu ya yang paling penting dan tentu apa yang dilakukan oleh Ibu sikap yang tanggap dan sikap yang cepat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai macam inovasi-inovasinya Bu saya tentu ya mendukung sepenuhnya. Hanya memang yang perlu dipastikan adalah soal bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan dukungan anggaran yang memadai. Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Wakil Ketua Komisi VIII Bapak Marwan Dasopang.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu Menteri Sekretaris Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Para Pimpinan dan Para Anggota yang ada di ruangan dan di Virtual.

Hari ini kita membahas RKA K/L-nya kementerian yang kita bahas hari ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Menteri kami juga meyakini bahwa anggaran 279 ini jauh dari yang dibutuhkan. Tetapi siklus anggaran sudah menyebutkan inilah anggaran yang pagu definitif di kita. Maka tinggal kita berupaya seperti yang disampaikan oleh Pak Ace, tambahan anggaran itu tinggal ada di Badan Anggaran karena itu kami menyarankan kepada jajaran supaya melakukan komunikasi. Kami akan mendukung bila ada kemungkinan untuk mendapatkan tambahan anggaran kami akan memberikan pemikiran dan pertimbangan yang memang betul-betul pasti jauh dari memadai.

Saya ingin menyampaikan apakah tambahan 156,5 itu sudah termasuk usulan dari KPAI. KPAI itu mengusulkan tambahan 11,089. Kalau belum masuk ada baiknya dimasukkan karena tadi para jajaran KPAI menemui kami Pimpinan merasa bahwa anggaran mereka turun dari tahun lalu. Karena itu berharap ada tambahan 11,089 itu. Jadi nanti kalau di dalam kesimpulan kita kalau belum masuk di dalam usulan tambahan itu dimasukkan 11 miliar lagi.

Nanti kita bantu komunikasi ... Saya senang kalau fungsi koordinasi ini semakin menunjukkan bahwa DAK nonfisik sudah bisa dikhususkan 101 miliar. Tapi perlu catatan Ibu bahwa apakah 101 miliar ini KPPPA ini bisa mengukur kinerjanya di kabupaten, kota dan di provinsi? Kalau sudah bisa kita mematok sasaran capaian dan target dari DAK ini kita bisa mengalokasikan yang selama ini kita berikan ke daerah kita harus tekan ke program lain. Maka karena itu mungkin butuh komunikasi juga baik itu Ke Dirjen Anggaran mekanisme pelaksanaan program yang 101 ... itu kita bisa memandu kabupaten/kota itu di sana jangan seenaknya saja. Kami sudah melakukan perlindungan perempuan dan anak tapi kinerja anda tidak terukur. Mungkin ada yang perlu kita komunikasikan dengan berbagai pihak.

Tentu kita berharap selain DAK nonfisik ini dicarikan di tempat-tempat lain perlindungan anak karena sebagian besar ketika kita berdialog semua K/L punya program dan perempuan dan anak. Cuma kita enggak bisa mengevaluasi andaikan kita bisa evaluasi, bisa kita ukur, capaian, target dan sasaran itu sebetulnya kita bisa mengalokasikan ke tempat lain K/L yang selama ini kita kerjakan. Maka koordinasi itu sebetulnya kita butuhkan karena saya melihat dari waktu ke waktu, anggaran kita nggak bisa bergeser. Kebijakan Pemerintah sudah begini. Jadi apa yang menjadi kebijakan di K/L - K/L lain tentang urusan anak dan perempuan mestinya bisa dilaporkan ke Kementerian PPPA. Kami kira hanya itu saja Bu kembali lagi kami menyakini bahwa apa yang menjadi target kita tidak bisa diselesaikan dengan anggaran yang sangat sedikit, sekali pun menurut kami ini persoalan ini sudah banyak yang terjawab di beberapa daerah kehadiran daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Mengenai isu-isu aktual kami bisa memahami Pemerintah menjadi apa tempat mengatur masyarakat tentang ketidak sempurnanya kita membahas di tahun lalu tentang RUU PKS. Memang di sini tempat pembahasannya waktu itu. Kami itu sudah bisa menyebabkan bagian-bagian dari RUU PKS terkait dengan rehabilitasi perlindungan dan pencegahan itu kita sudah sepakat yang masih panjang perdebatan itu kemarin tentang tidak ada pemidanaan selain substansinya masih berbeda pandangan tapi ada terkait dengan perubahan undang-undang juga di Komisi III. Komisi III kita berkoordinasi waktu itu menyarankan menunggu selesai perubahan Undang-Undang Pidana karena DPR tidak boleh memproduksi undang-undang yang saling bertabrakan di dalam bahasa yang satu itu waktu itu. Kemudian mengenai definisi dan judul sebetulnya kalau ada apa namanya narasi di luar DPR tidak peduli terhadap korban kita udah selesai kalau urusan rehabilitasi, perlindungan, dan pencegahan yang tidak selesai itu karena terkait dengan undang lain. Kami siap saja karena ini sudah diputuskan di badan legislasi dan di Bamus bahwa karena masa pembahasan itu hanya sampai Oktober, maka kita menarik sudah dimasukkan lagi di 2021. Apakah di Komisi VIII dibahas apakah di Badan Legislasi itu tergantung Bamus nanti, tapi begitu. Jadi kalau kami kalau di lapangan lagi dibuat ya kita siap yang terpenting semua kelompok - kelompok pandangan fraksi bisa diberikan pengertian yang sama, kira-kira

begitu menanggapi apa yang Ibu sampaikan tentang RUU PKS kan kita sudah ... Saya kira itu Ketua terima kasih *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah. Kalau bicara Undang-Undang PKS ini Pak Marwan harus memilih kata-katanya yang pas. Jangan sampai nanti diplesetin. Baik itu dari meja pimpinan saya izin Ketua tambahkan sedikit.

Saya hanya ingin tanya sedikit Bu Menteri karena hari ini kita membahas masalah anggaran RKA K/L 2021. Maka saya langsung saja ke masalah angka-angka yang pertama Ibu ada mengajukan perpindahan dari dukungan manajemen ke kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar .. ,4 miliar mungkin ini bisa sedikit diperdalam Bu Menteri alasannya apa? Kenapa kok berubah waktu awalnya sudah diajukan sekarang dituker gitu ya? Terus nanti arahnya pas ngambil hari ini mau taruh di mana alasannya apa? Mungkin apakah ada yang perlu di programnya atau memang ada yang saya enggak tahu ada tambahan program atau ada tambahan kebutuhan di kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak itu mungkin kita sedikit diberi sedikit qalaupun memang kita paham belum bisa kita membahas sampai satuan 3. Tapi setidaknya kami punya gambaran singkat sehingga kami bisa dukung Ibu untuk masalah realokasi anggaran.

Yang kemudian yang kedua masalah penambahan 156,5 miliar. Tentunya Bu Menteri, Pak Sekjen kami di Komisi VIII ini *Insyah Allah* tadi kata Pak kata Pak Husni orang-orang baik semua apalagi banyak perempuannya. Jadi *Insyah Allah* didukung karena ini untuk perlindungan perempuan dan anak. Dan yang laki-laki juga hormat sekali sama istri saya di rumah. Jadi tadi saya sampai di WhatsApp istri saya karena hari ini kita *live* beliau bilang "Kak itu pokoknya didukung ya untuk perempuan gitu" Kita sebenarnya enggak bukannya takut sama istri ini Pak Ace ya? Cuma memang istri lebih berani dari kita. Jadi kita dukung Bu tapi kami perlu sedikit penjelasan secara garis besar yang berbasis, kinerja berbasis bukan hanya output input tapi juga output. Apa yang mau dicapai dengan adanya realokasi empat setengah miliar dan juga penambahan 156,5 miliar?

Kemudian yang terakhir tentunya untuk KPAI, kita juga tadi sudah menerima dan berbicara secara garis besar bahwa KPAI memang perlu anggaran yang anggarannya dirasa belum cukup Bu Menteri. Kalau memang kemudian bisa dimasukkan dalam anggaran yang tambahan 156 tentunya kita akan senang sekali karena bagaimana pun kami dengan KPAI kerjasama punya kerjasama yang baik juga. Kalau urusannya masalah apa perlindungan anak pasti selain ke Ibu Menteri pasti kami juga menghubungi teman-teman yang di KPAI dan saya rasa mereka bekerja cukup baik dan perlu apa dukungan anggaran.

Yang terakhir saya dengar tadi mungkin angka agak sedikit berbeda dengan Pak Marwan Dasopang kalau memang memungkinkan dari 13 itu bisa naik ke, kan sekarang 13,9 ya? Bisa naik ke 25. Jadi kurang lebih 11,890 itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan kami persilakan Ibu Menteri mungkin, Pak Sekjen atau jajaran yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sudah diajukan.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Terima kasih Pimpinan. Saya mungkin akan menjawab secara gambaran umum, secara teknis kalau perlu tambahan dari Sesmen dan para Deputi dipersilakan. Tapi mulai dari yang *urgent* ya yang menjadi pertanyaan daripada baik Pimpinan maupun Anggota Komisi VIII berkaitan dengan KPAI. Kami sangat sepaham, sangat-sangat sepaham bahwa KPAI tidak boleh diturunkan bagaimana fungsi pengawasan apalagi di era sekarang ini betul-betul kerja dari teman-teman KPAI ini kami rasakan. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan berkaitan dengan penurunan anggaran itu tidak kami lakukan di kementerian ini. Dan satu hal juga kami sampaikan ketika dana kita *direfocusing* 72 M kira tidak utak atik yang dananya KPAI. Demikian juga yang dana dekonsentrasi. Kami hanya potong anggaran-anggaran yang 72 miliar itu dari satker-satker yang ada di kementerian. Nah dengan KPAI karena Bapak Ibu maklumi bersama dari anggaran 2020 menjadi 2021 kenaikan yang ada di kementerian ini kan 5,6 miliar ya? Nah makanya dari 5,2 itu justru kami di tahun 2020 ini dana KPAI itu meningkat walaupun tidak signifikan tidak sesuai dengan harapan teman-teman karena kami naiknya sedikit justru itu kami berikan kepada KPAI.

Dulu anggaran KPAI yang Rp.11.403.767.000 sekarang itu menjadi Rp.13.110.132.000 justru meningkat di tahun 2021 ini. Tapi mungkin kalau dari teman-teman ada dari KPAI menghadap Komisi VIII kami sangat setuju. Nah ini lah nanti kita akan saya, kalau kami di kementerian ini sama *support* kalau kita penambahan anggaran dari KPAI. Kalau seandainya perjuangan dengan tambahan tuisi ini seperti apa yang kami ajukan tambahan anggaran itu dimungkinkan itu tidak masalah, kalau kita diperuntukkan karena betul-betul KPAI itu mitra-mitra yang luar biasa yang mitra kami di kementerian ini. Kemudian tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan saya sangat mengapresiasi pada intinya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ini sudah RDP yang keempat kali ya saya di kementerian ini luar biasa selalu *support* teman-teman para pimpinan anggota Komisi VIII terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah ini merupakan kekuatan kami untuk terus mendampingi perempuan-perempuan dan anak-anak di Indonesia.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri maaf tadi sebelum sekalian menjawab, ... dari 156.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Belum Pak KPAI, belum Pak. Itu kita baru khusus berkaitan dengan 2 tambahan tusi saja. Tapi kalau saya pikir itu masih bisa diatur kalau seandainya itu diberikan kepada KPAI juga karena kami sangat memahami dan berkaitan dengan ke pagu anggaran ini ketika 156 itu perlu menjadi perhatian Kemenkeu. Dan Kemarin kami sudah komunikasikan juga dengan Bappenas karena alasannya itu adalah satu berkaitan dengan posisi APBN yang kedua karena kami di Kementerian PPPA ini sudah dapat gelontoran dana DAK. Itu yang menjadi pertimbangan belum menjadi perhatian prioritas untuk tambahan anggaran 156 ini. Mudah-mudahan dukungan teman-teman dan nanti kami lebih intens lagi bicarakan dengan teman-teman dan nanti kami lebih intens lagi bicarakan dengan teman-teman KPPPA itu adalah orientasi yang jelas dana itu untuk kegiatan apa saja. Mudah-mudahan akan menjadi perhatian dalam penambahan anggaran in.

Kemudian tadi disampaikan juga berkaitan dengan DAK. Kalau DAK ini tentu ini akan indikator-indikator dari 34 provinsi kemudian mengalirnya 216 itu sudah menjadi indikator-indikator catatan-catatan yang kami berikan yang sudah detil kita bicarakan juga dengan Bappenas. Itu ada indikator kriteria kenapa nanti kita berikan ke 34 provinsi tersebut, kenapa 216 Kabupaten itu yang mendapatkan dana dari DAK itu akan menjadi apakah di sana kasus yang tinggi terbentuknya UPTD dan sebagainya itu akan menjadi kriteria pemilihan daripada 34 provinsi maupun 216 berkaitan dengan DAK ini. Tentu mekanismenya itu transfer ke daerah kalau di atas ini memang kita berikan akan transfer ke daerah. Kalau DAK ini memang kita akan berikan transfer kepada dinas PPPA kemudian akan peruntukannya kepada UPTD PPPA provinsi demikian juga kepada kabupaten/kota dan UPTD kabupaten/kota. Yang itu kemarin karena kita khusus dan karena ini DAK non fisik yang tentu arahnya adalah untuk layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena DAK ini sudah jelas adalah non fisik. Kemudian salah satu lagi.

KETUA RAPAT:

Sebelum lanjut mohon maaf ini sebelumnya DAK non fisik atau DAK 101,7 miliar ini memang sudah ada atau mau diajukan?

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Sudah ada. Sudah makanya yang menjadi pertimbangan kemarin karena Kemenkeu dari keuangan kan sudah memberikan DAK kepada Kemen PPPA sebesar 101 jadinya ketambahan 156 itu dijadikan tanda tanya pertimbangan untuk dibantu untuk diberikan karena sudah mengalir dana 101 di itu ya.

KETUA RAPAT:

Tapi dipanya di UPTD-UPTD?

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Kan DAK itu kan mengalirnya langsung ke daerah Pak ditransfer ke daerah.

KETUA RAPAT:

Terima kasih ya. Silakan lanjut.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Kemudian berkaitan dengan tambahan 156 mungkin kenapa kami tidak sampaikan tabel rinciannya lagi karena itu betul-betul 23 Juni ketika RDP 2 bulan yang lalu berikut kita sudah diskusikan secara *intens* juga dengan teman-teman Komisi VIII.

Kemudian berkaitan dengan inovasi yang ditanyakan Mbak Diah. Sebenarnya kami di Kementerian PPPA ini mudah-mudahan 2021 ini kami bisa wujudkan. Kami sudah *intens* bicarakan teman-teman keterkaitan satker yang satu dengan lainnya. Kita ada *joint* nanti ketika kita turun ke daerah itu tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri. Itu yang kita harapkan inovasi-inovasi ini kenapa pada kesempatan ini mungkin persepsi Bapak Ibu semuanya yang kami tampilkan kekerasan saja, bagaimanapun juga permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak apakah itu kekerasan kemudian perkawinan anak, eksploitasi anak tidak terlepas di hulunya adalah kemiskinan. Makanya konsep kami ke depan ini adalah konsep yang hulu sampai ke hilir bagaimana kita di satu titik pemberdayaan perempuan yang kita lakukan. Karena di harapan daripada Bapak Ibu semuanya intinya kementerian ini tidak hanya menjadi pemadam kebakaran tidak menjadi penanganan kasus saja bagaimana inovasi-inovasi pemberdayaan perempuan itu dilakukan. Dengan langkah-langkah itu sudah kami lakukan tidak hanya kami sendiri di dalam paparan kami juga kami sudah sampaikan kami bersinergi dengan PT.PNM itu yang telah memperdayakan perempuan pendampingan di bidang ekonomi sampeir 4,4 juta dengan pendamping 26.000. Itu inovasi-inovasi yang kami lakukan dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki.

Demikian juga tidak hanya dengan pemerhati teman-teman se-isu yang kami ajak bersinergi. Dengan kementerian lembaga pun kami lakukan dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki. Salah satunya ketika ada tambahan tusi kami sangat paham sekali bahwa dengan kasus penanganan kasus kekerasan lintas provinsi, lintas negara dapat bagi memberikan keamanan kepada korban ini perlu yang namanya Rumah Aman. Yang berkaitan dengan rumah aman ini kami kebetulan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini walaupun kami punya aset yang kalau saya melihat belum berfungsi maksimal. Itu yang kita maksimalkan saya sudah menghadap Pak Menteri PU PR supaya kita didampingi untuk dibangun dari pada aset yang kita miliki tanah yang ada untuk memberikan rasa aman ketika nanti ada kasus-kasus yang harus kami tangani dengan tambahan tusi ini mau tidak mau suka tidak suka itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengeksekusinya.

Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian berkaitan terjun payungnya anggaran di kementerian ini apakah tidak terlepas dari pada karena terserapnya tidak terserapnya, tidak terealisasinya anggaran di kementerian ini. Nah walaupun pernah kami sampaikan pada kesempatan ini kami pertegas kembali berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2019 itu kan 96,79% dari anggaran 496 miliar di tahun 2019 itu sudah terealisasi sebesar 480 miliar lebih. Yang artinya sebenarnya mudah-mudahan saya yakin kalau bicara masalah realisasi anggaran yang tidak terserap menjadi kendala saya pikir itu bukan menjadi alasan karena realisasi anggaran di tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini realisasinya adalah sebesar 96,79%.

Kemudian mohon maaf tadi juga menyampaikan berkaitan dengan apa yang kami paparkan itu sama sekali tidak ada pandemi. Mohon maaf Pak bukannya kami tidak peduli dengan pandemi justru kami sangat merasakan pandemi ini dirasakan oleh kaum perempuan. Dan langkah-langkah itu kami lakukan tapi mohon maaf secara implisit mungkin kami tidak tampilkan kami tidak paparkan karena kita lebih mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021. Mohon maaf secara lebih kami isu aktualnya kami sampaikan adalah kasus kekerasan. Itulah yang sebenarnya yang terjadi di masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkatnya tajam. Tapi kalau untuk pendampingan para perempuan itu betul-betul kami kawal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Ketika 22 Maret diumumkan pandemi kami di awal April kami sudah mengumpulkan para mitra-mitra kami para kaum perempuan apakah itu PEKKA, ASPPUK. PT. PNM kondisinya seperti apa ya kita ajak *intens* diskusi. Kemudian kita sama-sama carikan solusinya. Itu yang langkah-langkah kami lakukan dan kami sangat merasakan sekali pandemi ini sangat berdampak kepada perempuan terutama perempuan yang di PHK di rumahkan. Kemudian PMI yang dipulangkan. Kemudian perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga karena suami diisolasi dan sebagainya itu betul-betul kami *intens* melakukan pendampingan kepada teman-teman kaum perempuan yang mengalami pandemi Covid-19. Ini termasuk dari pendampingan *Banpres* itu juga kami dampingi mana yang kami masukkan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan sosial demikian juga mana yang mendapatkan bantuan stimulus ekonomi tergantung daripada permasalahan yang dialami oleh para kaum perempuan. Secara umum itu yang dapat kami sampaikan mungkin ada tambahan Pak Sesmen.

SEKRETARIS KEMENPPPA (Dr. PRIBUDIARTA NUR SITEPU, M.M):

Izin Bu Menteri sedikit tambahan yang seluruhnya telah ditanyakan oleh Pak Ihsan terkait dengan pergeseran anggaran. Terkait dengan pergeseran anggaran antara program teknis dan program dukungan manajeme. Pertama-tama memang ada re-design program dan anggaran di Kementerian Keuangan sehingga kemudian anggaran sekretariat ke-deputian yang sebelumnya ada masing-masing kedeputian itu harus masuk ke

program dukungan manajemen. Berubah dari program dukungan teknis ke program dukungan manajemen.

Sementara hasil diskusi dengan Bappenas dan Kemenkeu terjadi juga perubahan untuk dukungan kegiatan survei, survei pengalaman hidup perempuan dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja yang semula ada di Biro Data di Sekretariat dan dari program dukungan manajemen itu harus dialihkan menjadi program teknis di masing-masing kedeputian. Jadi karena ada pergeseran-pergeseran itu Bapak jadi mohon dukungan terjadi perubahan dari anggaran perubahan baik pada anggaran dukungan manajemen maupun pada anggaran teknis.

KETUA RAPAT:

Izin Ketua, jadi Pak Sesmen ini hanya berbicara masalah nomenklatur saja ya. Nggak ada program atau dukungan manajemen yang dicoret atau yang ditambah enggak ada ya?

SEKRETARIS KEMENPPPA (Dr. PRIBUDIARTA NUR SITEPU, M.M):

Nggak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi bicara tentang nomenklaturnya saja ya?

SEKRETARIS KEMENPPPA (Dr. PRIBUDIARTA NUR SITEPU, M.M):

Nggak ada Pak. Jadi bicara tentang nomenklaturnya saja Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup? Baik Ibu Bapak saya rasa sudah cukup tanya jawabnya tadi juga sudah saya jelaskan beserta Pak Sesmen sudah menjelaskan hal-hal yang ditanyakan para Pimpinan dan Anggota. Langsung saja kita bacakan kesimpulan. Silakan. ... lampunya dimatikan sama ini nih apa infokusnya dimundurin sedikit. ... ya cukup. Bawahnya. Sudah keliatan Bu/Pak? tolong dikasih *hard copy*nya sudah? Oke Baik saya bacakan.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Masa Persidangan 1, Tahun Sidang 2020/2021 Rabu 2 September 2020. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda pembahasan RKA K/L tahun 2020/2021 dan isu-isu aktual dan solusinya. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2021 sebesar Rp.279.560.938.000. Ditjen Pagu Anggaran menurut satuan kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian (saya rasa saya enggak perlu bacakan semua Bu ya? Jadi sudah kelihatan tablenya. Nanti kalau ada koreksi akhir mengenai ini Ibu bisa kasih masukan)
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap RKA K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan pejabat eselon 1.

Saya rasa mohon maaf saya mau balik lagi ke awal serasa ini perlu kita sebutkan angka-angkanya karena memang kita sedang membahas RKA K/L dan membahas anggaran.

- a. Jadi yang pertama Sekretariat Kementerian dengan jumlah total Rp.111.142.376.088.
- b. Kemudian yang kedua, Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp.21.500.000.000.
- c. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan total Rp.21.750.000.000.
- d. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dengan total anggaran Rp.14.850.000.000.
- e. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Rp.48.216.500.000.
- f. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Rp.48.200.000.000.
- g. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rp.13.910.132.000.

Maka baik itu dari dukungan manajemen maupun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak dengan total Rp.279.568.938.000

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap RKA K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan pejabat eselon 1.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak Republik Indonesia tahun 2021 sebesar 101,7 Miliar untuk dana alokasi khusus non fisik perlindungan perempuan dan anak di 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2021 sebesar:
 - a. Rp.156.500.000.000 untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk tambahan anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2021.

- b. Rp. 11.089.868.000 yang akan digunakan untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan kelembagaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Indonesia.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2021 memperhatikan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain menyusun program-program inovatif dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik dari segi strategi, metode, dan teknis pelaksanaan.
5. Komisi VIII DPR RI akan mengupayakan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU prioritas dalam prolegnas 2021.

Saya persilakan dari Ibu Menteri mungkin ada masukan terlebih dahulu. Pasti urusannya kata ini.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Terima kasih Pimpinan, secara umum mungkin kami sepakat dengan apa yang disampaikan. Mungkin pelurusan saja seperti yang sudah kita sepakati tadi bersama berkaitan dengan dukungan dari pada Bapak Ibu Pimpinan Anggota DPR RI Komisi VIII berkaitan dengan poin tiga ya. Kita pertegas. Kalau seandainya kami dengan teman-teman berkaitan dana 156 ini karena sampai pagu anggaran ini belum mendapatkan apa lampu hijau, nah kami tidak tadi kami sudah diskusikan juga sama teman-teman nanti kita akan lebih perdalam lagi kebutuhannya. Walaupun, sebenarnya di angka 156,5 miliar ini kami sudah presentasikan di tanggal 23 Juni RDP yang lalu. Itu memang kebutuhannya yang sudah rinci yang memang kami butuhkan. Tapi kalau seandainya karena tadi juga disampaikan oleh Pak Ace karena ini situasi yang sulit untuk dalam tambahan anggaran itu hanya bisa di Banggar supaya tidak terlalu menyulitkan teman-teman di Komisi VIII kalau seandainya ini digabung menjadi satu di angka 156 ini juga kami tidak keberatan sebagai arahan dari pada pimpinan sidang di awal. Tapi kalau misalnya masih bisa dipertimbangkan ini tidak masalah ini juga ada dua sisi yang terpisah mana yang di acc oleh ke dari Kemenkeu apakah 2AB dari poin tiga ini kita tetapkan atau bagaimana.

Yang pada intinya kami tidak permasalahan dan kami mendukung *support* dari pada teman-teman Komisi VIII. Tapi kalau mungkin di angka A tadi cuman di 156 Miliar untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan 2 tambahan tusi yang diberikan melalui Perpres 65. Apakah tidak dimungkinkan seperti itu ya Pak? Kalau diperdalam lagi bahwa 156,5 miliar ini kenapa kita ajukan tambahan anggaran berkaitan dengan Perpres 65 2020 yang mengamanahkan 2 kewenangan kepada kami di kementerian ini. Kalau itu betul-betul dipisahkan.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Ada beberapa catatan. Pertama, poin dua ini supaya tidak membebani KemenPPPA. Poin dua jangan kita anggap tambahan. Ini tidak masuk bagian dari anggaran kementerian. Ini adanya di DAK. Jadi kalau kita sebutkan ini tambahan anggaran nanti seolah-olah sudah besar. Jadi kita mengapresiasi kemampuan Kementerian PPPA yang mendapatkan program dari dana alokasi khusus yang disebut saja jangan tambahan. Kalau ini kan menjadi luar biasa nanti sudah 300 berapa anggarannya. Jadi kita mengapresiasi kementerian ini untuk mendapatkan dukungan dari dana alokasi khusus. Bahasanya begitu supaya tidak dipahami ini tambahan anggaran. Dengan demikian kita masih punya moral meminta tambahan anggaran. Kalau kita sebut ini tambahan kita tidak punya moral lagi itu. Jadi kalimatnya jangan tambahan ya. Ini kita apresiasi koordinasi kerja. Kan belum, saya sampaikan tadi tentu Ibu bisa mengevaluasi sasaran? Target? Belum tentu. Ini kan hanya dana alokasinya ada di Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Daerah yang nggak bisa kita jangkau kita evaluasi nggak bisa. Tapi tentu Kita berterima kasih sudah ada anggaran khusus mengenai anak dan perempuan menysasar di 34 provinsi dan 216 kabupaten. Terima kasih. Tapi jangan dihitung tambahan. Saya pikir tidak apa-apa Bu, kalau kita tetap meminta tambahan karena kita sejak awal sudah menyatakan prihatin. Ya kita cantumkan aja. Persoalan dapat ya tidak apa-apa. Saya pikir tidak malu kita sekalipun itu sudah pagu definitif.

Catatan kedua, karena Kemen PPPA ini belum meminta persetujuan kita tentang realokasi yang sebesar, sebesar berapa bukan, 4,5 miliar itu payung hukumnya belum ada. Jadi harus kita tambah 1 poin lagi bahwa Komisi VIII menyetujui realokasi anggaran sebesar 4,5. Tapi kalau nggak ada keputusan di sini jadi pelanggaran Bu. Jadi lupa tadi kita menentukan itu. Apakah? Tapi bisa setelah ini bisa, bisa poin ke 4. Nggak poin 4. Poin ke empatnya bisa bergeser menjadi 5 karena pembahasan kita hari ini ada laporan pembahasan RKA K/L maka disebutkan lebih awal RKA K/L dulu baru hal-hal lain. Tadi itu setelah itu.

KETUA RAPAT:

Yang belum diedit Pak.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Ya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Eggak tadi Pak Marwan ada usulan untuk yang KPAI itu bagaimana?
... atau ...

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

KPAI tinggal terpisah.

KETUA RAPAT:

Dipisah?

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Sudah benar tadi Pak kalimatnya itukan sampai tadi anak tadi ya pelaksanaan program Komisi VIII mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar:

- a. 156 Miliar untuk memaksimalkan pelaksanaan program perlindungan anak.
- b. 11 untuk digunakan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan di KPAI.

KETUA RAPAT:

Baik dari Anggota? Cukup. Silakan Ibu mungkin ada editorial atau apa.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Terima kasih Pak Marwan sudah mengingatkan sebenarnya itu juga menjadi catatan penting bagi kami melalui rapat kesimpulan Rapat Kerja ini mempertegas bahwa Komisi VIII mendukung pergeseran program anggaran dari manajemen usaha ke kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak. Ya benar. Program dukungan manajemen bergeser ke program kesetaraan gender perlindungan perempuan. Dan kami menyampaikan apresiasi tadi sudah mengingatkan yang tidak termasuk tambahan poin lagi bahwa sudah dipertegas oleh Komisi VIII bahwa mendukung pergeseran anggaran tersebut. Terima kasih banyak Pak. Berarti kita ada 6 poin jadinya ya Pak ya.

KETUA RAPAT:

4,5 ya Bu ya? 4,5 dari dukungan manajemen ke kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak. Baik mungkin dari Pak Sesmen ada enggak kelihatan ya di sini? Cukup ya nanti mungkin kalau ada editorial kita paham lah kalau memang perlu ada yang diperbaiki lagi nanti kita bisa ulang pengetikannya. Intinya kira-kira kesimpulan rapat kita pada hari ini ada sekitar 5 poin dan ini 5 ya? Enam *sorry*.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Enam tambahan dari Pak Marwan tadi 6 poin.

KETUA RAPAT:

Iya, tambahan realokasi 6 poin dan sudah disepakati oleh pihak Pemerintah maupun dari Komisi VIII.

Baik hadirin yang saya hormati Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kami banggakan dan kami sayangi sebelum kami menutup rapat kerja pada hari ini kami persilakan kepada Ibu

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyampaikan kata akhirnya kalau memang ada silakan.

MENTERI PPPA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.S.i):

Terima kasih pimpinan tentunya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di *closing* ini hanya kami bisa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Komisi VIII demikian juga Para Anggota Komisi VIII yang tidak pernah lelah mendukung kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas doa dan dukungannya pada kami pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak Sesmen beserta seluruh jajaran yang telah hadir dan tadi juga sudah menyampaikan kata akhirnya. Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita hari ini. Sesungguhnya kami masih ingin kangen-kangenan sama ibu malah kalau bisa sampai jam 9 malam tapi karena waktu juga. Semoga semua masukan dan keputusan yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan apapun yang kita niatkan mendapatkan berkah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa amin. Demikian acara ini saya tutup dengan membacakan. Hamdalah *alhamdulillahirobbilamin bila fii sabililhaq fastabiqul khairat.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 16.27 WIB)

Jakarta, 2 September 2020

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001

